

**RENCANA AKSI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Target Pelaksanaan (Triwulan)				Output
								I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.935.900	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			√		Jumlah Dokumen Renja Murni dan Perubahan Yang Disusun
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) yang disusun
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.947.936.070	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan Bagi ASN
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		9.999.600	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun
				3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								
				a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		9.904.300	Identifikasi Kebutuhan Akan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	√				Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun
				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		64.600.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		9.966.800	Identifikasi Kebutuhan Akan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	√				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		50.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		38.050.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan
				b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		38.468.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan
				c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		149.999.200	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√	√	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan
				d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		93.057.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan
				e. Fasilitas Kunjungan Tamu		33.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Fasilitas Kunjungan Tamu	√	√	√	√	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	√	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		50.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	√				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		467.247.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√			√	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				b. Pengadaan Mebel		93.648.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Mebel			√		Jumlah Unit Pengadaan Mebel
				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		76.991.400	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		567.198.664	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

				8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	29.900.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional	√					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.310.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		√				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.894.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√	√		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
				1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
				a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	928.764.900	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	√	√	√			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									
				1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi								
				a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42.655.631.200	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√		√		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	575.228.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	√			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
				Perumusan Kebijakan dibidang pendaftaran pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan								

					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	274.920.000	Identifikasi kebutuhan akan pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	√	√	√	√	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya									
				1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
					a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	130.978.900	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	√	√	√	√	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.987.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	√	√		√	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial									
				1. Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
					a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.089.500	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	√			√	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	777.610.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	√	√	√	√	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	872.007.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota